



Persepsi Akademisi terhadap Inovasi “Green Sukuk” pada Arus Modal Asing di Indonesia

Atika Sofia¹, Indri Melati², Marsalina Putri³, Ratu Amanda Hartono⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

E-mail : atika.sofia1897@student.unri.ac.id¹, indri.melati1898@student.unri.ac.id²,
marsalina.putri7503@student.unri.ac.id³, ratu.amanda1792@student.unri.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received November 28, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted November 03, 2025

Keywords:

Green Sukuk,
Foreign Capital Flows,
Sustainable Finance,
Islamic Finance,
ESG Investment

ABSTRACT

This study explores academics' perceptions of Green Sukuk as a financial innovation and its relevance in attracting foreign capital flows to Indonesia. While the Indonesian government promotes Green Sukuk as a Sharia-compliant sustainable financing instrument capable of supporting environmentally friendly projects and enhancing global investor confidence, scholarly evaluations of its actual effectiveness remain limited. Using a qualitative approach with in-depth, semi-structured interviews involving academics in business and international relations, this research finds that Green Sukuk is generally viewed as a strategic breakthrough that can strengthen Indonesia's international reputation and expand access to green financing. However, academics emphasize that foreign investors' decisions are primarily driven by fundamental economic factors—political stability, governance quality, and expected returns—rather than the appeal of “green” or “Sharia-compliant” labels alone. The study also identifies several challenges, including low public literacy, limited human resource capacity, and structural risks associated with Indonesia's reliance on non-eco-friendly industries. Overall, Green Sukuk holds significant potential as an instrument for attracting foreign capital and promoting sustainable development, yet its long-term success depends on consistent policy implementation, transparent project management, and the authentic application of both green and Sharia principles.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received November 28, 2025

Revised November 30, 2025

Accepted November 03, 2025

Kata Kunci:

Green Sukuk,
Arus Modal Asing,
Keuangan Berkelanjutan,
Keuangan Syariah,
Investasi ESG

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi persepsi akademisi terhadap inovasi Green Sukuk dan relevansinya dalam menarik arus modal asing ke Indonesia. Green Sukuk dipromosikan pemerintah sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan berbasis syariah yang mampu mendukung proyek ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor global. Namun, kajian akademik mengenai efektivitas dan legitimasi instrumen ini masih terbatas. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap akademisi di bidang bisnis dan hubungan internasional, penelitian ini menemukan bahwa Green Sukuk dipandang sebagai terobosan strategis yang dapat memperkuat reputasi Indonesia dan memperluas akses pembiayaan hijau. Meski demikian, para akademisi menekankan bahwa keputusan investor asing tetap didorong oleh faktor fundamental seperti stabilitas politik, tata kelola yang baik, dan potensi keuntungan, bukan semata oleh label “green” maupun “syariah”. Temuan lain menunjukkan adanya tantangan berupa literasi publik yang rendah, kapasitas SDM



yang terbatas, serta risiko struktural terkait ketergantungan ekonomi pada sektor yang tidak ramah lingkungan. Secara keseluruhan, Green Sukuk memiliki potensi signifikan sebagai instrumen penarik modal asing sekaligus pendorong pembangunan berkelanjutan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, transparansi pengelolaan proyek, dan penerapan prinsip hijau serta syariah secara autentik.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Atika Sofia
Universitas Riau
Email: atika.sofia1897@student.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam lima tahun terakhir, Green Sukuk menempati posisi strategis dalam kebijakan fiskal Indonesia karena dianggap mampu menjawab dua kebutuhan utama, yaitu percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 serta meningkatnya tekanan lingkungan dan risiko perubahan iklim. Sebagai instrumen keuangan syariah, Green Sukuk diposisikan untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi nasional dengan agenda pelestarian lingkungan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pemulihan ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat, di mana pertumbuhan yang semula stabil pada kisaran 5% sebelum pandemi misalnya 5,17% pada 2018 sempat berkontraksi hingga -2,07% pada 2020, namun kembali rebound menjadi 5,31% pada 2022 dan tetap berada di atas 5% pada 2023. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendanaan besar untuk menjaga kesinambungan pemulihan dan mendukung agenda pembangunan prioritas, terutama infrastruktur, energi ramah lingkungan, dan transformasi ekonomi menuju negara maju sesuai target RPJMN 2025–2029. Kebutuhan pendanaan SDGs yang mencapai sekitar Rp14.000 triliun termasuk Rp4.000 triliun untuk mitigasi serta adaptasi iklim tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh kapasitas APBN, sehingga partisipasi sektor swasta, nasional maupun internasional, menjadi krusial. Dalam konteks inilah Green Sukuk dipandang sebagai alternatif strategis yang mampu menutup kesenjangan pendanaan dan memperluas keterlibatan investor global (Adzimatunur et al., 2024; Sisdiyanto, 2024).

Di sisi lain, agenda pembangunan Indonesia dihadapkan pada tantangan ekologis yang semakin nyata. Penurunan kualitas udara di kota-kota besar akibat emisi kendaraan, aktivitas industri, dan pembakaran sampah, serta laju deforestasi di Kalimantan dan Papua, memperburuk kerusakan ekosistem. Indonesia juga termasuk negara dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap bencana hidrometeorologi banjir, kekeringan, kebakaran hutan yang terus meningkat seiring perubahan iklim. Jika pembangunan ekonomi tidak diarahkan pada prinsip keberlanjutan, tekanan ini berpotensi mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh sebab itu, pembiayaan hijau menjadi keharusan bagi Indonesia. Green Sukuk hadir sebagai instrumen yang menggabungkan prinsip keuangan etis berbasis syariah dengan pendanaan proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi hijau, serta



program adaptasi iklim. Keberhasilan Indonesia menerbitkan sovereign Green Sukuk pertama di dunia pada 2018 menandai status Indonesia sebagai pelopor global dalam pembiayaan hijau berbasis syariah dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam pasar keuangan berkelanjutan internasional.

Inovasi Green Sukuk semakin relevan dalam konteks ekonomi pascapandemi yang membutuhkan pendanaan besar untuk proyek hijau dan pembangunan berkelanjutan (Sisdianto et al., 2024). Kondisi lingkungan yang rapuh deforestasi, polusi udara, degradasi ekosistem, dan meningkatnya bencana hidrometeorologi menuntut adanya mekanisme pembiayaan yang mampu menyinergikan prinsip syariah dengan agenda mitigasi perubahan iklim dan pengembangan energi terbarukan, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement serta SDGs (Adzimmatinur et al., 2024). Pemulihan ekonomi sejak 2021 menunjukkan perbaikan bertahap, didorong oleh pelonggaran mobilitas, distribusi vaksin, dan stimulus fiskal, meskipun masih sensitif terhadap dinamika global. Pertumbuhan ekonomi kembali menguat pada 2022–2024, ditopang konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, kebijakan hilirisasi mineral, dan surplus perdagangan yang berkelanjutan akibat lonjakan harga komoditas. Di tengah kebijakan moneter global yang mengetat, stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui pengendalian inflasi dan disiplin fiskal.

Sementara itu, ancaman perubahan iklim memberikan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang substansial bagi Indonesia. BNPB mencatat bahwa sekitar 98% bencana yang terjadi sepanjang 2010–2023 merupakan bencana hidrometeorologi (BNPB, 2023), sementara sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mengalami tekanan berat akibat perubahan musim dan suhu (Kementan, 2022; LIPI, 2020). Bank Dunia bahkan memproyeksikan penurunan PDB hingga 7% pada 2030 apabila mitigasi tidak dilakukan secara serius (World Bank, 2022). Meski pemerintah telah menetapkan komitmen dalam NDC untuk menurunkan emisi hingga 43,20% dengan dukungan internasional (KLHK, 2022), tantangan berupa keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman publik, serta kebutuhan teknologi dan SDM inovatif masih harus diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Dalam konteks arus modal asing, dinamika FDI dan investasi portofolio di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi global dan kebijakan domestik. Bank Indonesia mencatat arus modal asing keluar sebesar Rp4,58 triliun pada awal November 2025, sementara realisasi investasi asing pada kuartal III 2025 tetap mencapai Rp212 triliun (BI, 2025; BKPM, 2025). Hubungan siklikal antara arus modal asing dan indeks saham JCI menunjukkan sensitivitas investor terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia (Puswiyanta et al., 2025). Dengan demikian, Green Sukuk dipandang memiliki potensi sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung pembiayaan hijau, tetapi juga memperkuat daya tarik Indonesia di mata investor asing.

Persepsi akademisi terhadap inovasi Green Sukuk secara umum menunjukkan pandangan yang positif, terutama dalam konteks dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan komitmen penurunan emisi (Pujiantoro, 2021; Mauliyah, 2023). Green Sukuk dinilai strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global serta mendukung pencapaian SDGs (N Qur'an, 2025). Namun, sejumlah tantangan tetap mengemuka, seperti rendahnya literasi publik dan perlunya regulasi yang lebih kuat untuk memastikan efektivitas instrumen ini (Fahlevi, 2024). Akademisi dipilih sebagai subjek



penelitian karena mereka dinilai memiliki perspektif teoritis yang kritis dan objektif, bebas dari kepentingan promosi yang biasanya melekat pada pemerintah dan korporasi (Kurnia & Suswita, 2024; Baita & Suleiman, 2021).

Kesenjangan penelitian muncul dari minimnya kajian akademik yang secara komprehensif mengevaluasi efektivitas Green Sukuk sebagai penarik modal asing, meskipun pemerintah secara konsisten mempromosikan instrumen ini sebagai magnet bagi investor global (Pujiantoro, 2021). Klaim tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh analisis akademis yang kritis dan berbasis bukti, sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam untuk menilai dampak nyata Green Sukuk terhadap arus modal asing (Kurnia & Suswita, 2024). Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: bagaimana persepsi akademisi terhadap Green Sukuk sebagai inovasi keuangan; bagaimana efektivitasnya dalam menarik investasi asing; serta apa saja peluang dan tantangan implementasinya. Penelitian ini bertujuan menggali persepsi akademisi secara mendalam, menganalisis peran Green Sukuk dalam dinamika arus modal asing, dan mengidentifikasi peluang serta hambatan dalam pengembangannya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali secara mendalam persepsi akademisi terkait inovasi Green Sukuk di Indonesia. Mengacu pada pandangan Creswell dalam Fitriani Widiyani Roosinda (2021), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menembus dan memahami makna dari pengalaman manusia tanpa terikat pada aturan baku, melainkan berangkat dari realitas empiris yang ditafsirkan oleh setiap individu. Oleh karena itu, metode ini dipilih agar peneliti dapat menangkap keragaman pandangan para narasumber mengenai manfaat, risiko, dan faktor-faktor yang memengaruhi penilaian mereka terhadap Green Sukuk (Taylor et al., 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *in-depth interview* semi terstruktur, memungkinkan peneliti menyesuaikan arah pertanyaan secara fleksibel sesuai respons narasumber. Wawancara dilakukan terhadap akademisi yang memenuhi kriteria purposive sampling, yaitu dosen aktif lulusan S2 hingga Profesor dengan kompetensi di bidang ekonomi, bisnis, atau keuangan, serta berasal dari universitas terkemuka atau memiliki rekam jejak sebagai pembicara publik (Sugiyono dalam Maharani, 2018). Wawancara dilakukan melalui berbagai media voice note, telepon, Zoom, atau tatap muka agar tidak mengganggu fleksibilitas waktu narasumber. Identitas narasumber dijaga kerahasiaannya dan hanya dicantumkan dalam bentuk inisial, kecuali jika mereka memberikan izin eksplisit untuk dicantumkan dalam publikasi. Selain data primer, data sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah, laporan resmi, artikel berita, dan publikasi pemerintah untuk memperkuat, membandingkan, dan memvalidasi temuan dari wawancara.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yang merupakan teknik paling umum dalam penelitian kualitatif. Prosesnya dimulai dari perekaman hasil wawancara dengan izin narasumber untuk memastikan akurasi data saat ditranskripsikan. Setelah transkripsi selesai, peneliti melakukan proses koding, yaitu membaca seluruh data secara menyeluruh dan memberi kode pada bagian-bagian penting yang relevan dengan fokus penelitian. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema besar yang mencerminkan inti pembahasan, seperti persepsi terhadap status inovasi Green Sukuk, efektivitasnya dalam



menarik modal asing, peluang pengembangannya, serta berbagai tantangan implementasi. Langkah berikutnya adalah validasi data melalui triangulasi, yaitu membandingkan pandangan antar narasumber, mencocokkannya dengan data sekunder, serta melakukan konfirmasi langsung kepada narasumber untuk memastikan tidak terjadi kesalahan interpretasi. Proses triangulasi ini penting untuk menjamin keabsahan, kredibilitas, dan ketepatan data yang dihasilkan, sehingga temuan penelitian benar-benar merepresentasikan pandangan akademisi secara objektif dan mendalam. Dengan prosedur yang sistematis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai persepsi akademisi terhadap inovasi Green Sukuk dan relevansinya dalam dinamika arus modal asing di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi tentang Status "Inovasi" Green Sukuk

Analisis pada tema ini fokus untuk membahas apakah para akademisi memandang Green Sukuk sebagai sebuah inovasi yang otentik dan substantif, atau sekadar taktik pemasaran (*gimmick*) semata. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat pandangan yang beragam, dari pengakuan sebagai strategi pembiayaan yang krusial hingga kritik tajam terhadap instrumen tersebut. Narasumber 3 dari perspektif Administrasi Bisnis (AdBis) memandang Green Sukuk sebagai sebuah strategi inovatif yang dikeluarkan pemerintah. Beliau menyampaikan bahwa instrumen ini telah diluncurkan sejak tahun 2018 sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengembangkan proyek atau inovasi yang bersifat *sustainable energy*. Menurutnya, inovasi ini didorong oleh dua faktor yang pertama ialah adanya tuntutan global dari seluruh negara agar Indonesia segera mengadakan kegiatan atau proyek yang sifatnya *Green Energy* (energi bersih).

Faktor kedua berkaitan dengan realitas fiskal, di mana biaya untuk infrastruktur dan tenaga dalam proyek energi hijau sangat besar dan tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Menteri Keuangan meluncurkan Green Sukuk sebagai "injeksi tambahan" atau alternatif anggaran untuk membiayai proyek-proyek tersebut, seperti pembangunan pabrik bertenaga angin atau tambang nikel untuk bahan baku baterai. Pandangan yang positif juga disampaikan oleh Narasumber 2 dari akademisi Hubungan Internasional (HI). Meskipun baru mendalami konsep ini saat wawancara, beliau menilai bahwa Green Sukuk adalah "ide yang bagus" dan merupakan program yang positif. Beliau melihat instrumen ini sebagai langkah yang "menarik" karena menawarkan skema investasi yang secara spesifik ditujukan untuk perbaikan lingkungan dan pengembangan isu-isu ekonomi hijau.

Dalam pandangannya, adanya penggelontoran dana yang mudah bagi mereka yang berinvestasi di perbaikan lingkungan merupakan sebuah terobosan, meskipun beliau menekankan bahwa mekanisme pastinya perlu dipahami lebih lanjut. Adapun perspektif yang jauh lebih kritis muncul dari Narasumber 1 (HI), yang menyoroti aspek filosofis dari penamaan instrumen ini. Beliau tidak serta merta menerima status inovasinya, melainkan mengkritisi penambahan label "Syariah" di dalamnya. Narasumber 1 berpendapat bahwa konsepsi syariah dalam Green Sukuk terkesan hanya "numpang" pada program pembangunan berkelanjutan. Beliau mempertanyakan motivasi mendasar di balik penggunaan label tersebut: apakah tujuan utamanya adalah murni untuk menyadarkan masyarakat terhadap program berkelanjutan, atau sekadar ingin menghindari riba dalam mekanisme pembiayaan.



Lebih jauh, Narasumber 1 merasa perlu adanya pendalaman filosofis mengenai penempatan "diksi teologis" dalam instrumen kebijakan ini. Ia menganalisis bahwa kebijakan ini mungkin merupakan cara pemerintah mengintervensi kesadaran masyarakat yang belum terbangun secara alami (*political awareness*), dengan menggunakan instrumen syariah sebagai daya dorong atau *trigger* agar masyarakat mau berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Kritik ini menunjukkan bahwa bagi sebagian akademisi, inovasi Green Sukuk masih menyisakan pertanyaan besar mengenai apakah integrasi nilai agama dan ekonomi hijau ini bersifat substansial atau sekadar tempelan kebijakan.

Persepsi tentang Efektivitas Green Sukuk sebagai Penarik Modal Asing

Analisis difokuskan untuk membedah pandangan para akademisi mengenai seberapa efektif pelabelan "Green" dan "Syariah" dalam memikat investor asing. Tujuannya adalah untuk melihat apakah label etis dan religius ini mampu menjadi faktor determinan utama, ataukah investor asing tetap berpegang teguh pada faktor fundamental ekonomi konvensional seperti tingkat keuntungan (*yield*) dan mitigasi risiko. Narasumber 1 dari perspektif Hubungan Internasional (HI) memberikan pandangan yang sangat realistis dan tegas mengenai perilaku investor global. Beliau menekankan bahwa logika masuknya modal asing tidak serta-merta tunduk pada label instrumen, melainkan didikte oleh dua motif utama: kalkulasi bisnis murni yang berbasis pada pertimbangan untung-rugi, atau adanya kepentingan politis yang melatarbelakanginya.

Dalam pandangannya, kepercayaan (*trust*) investor asing tidak dibangun di atas pondasi label "Syariah" semata. Faktor yang jauh lebih krusial dan menentukan adalah stabilitas keadaan sosial politik dan keamanan di Indonesia. Beliau mengingatkan bahwa iklim investasi sangat sensitif; jika kondisi politik dalam negeri mengalami kekacauan (*chaos*) atau ketidakstabilan, investor tidak akan ragu untuk menarik kembali modal mereka, terlepas dari seberapa "hijau" atau "syariah" instrumen yang ditawarkan. Pandangan realistis ini mendapatkan afirmasi dari Narasumber 3 (AdBis). Sepakat dengan logika ekonomi tersebut, beliau menyatakan bahwa siapapun investor asing yang menjadi target pasar Green Sukuk, pada akhirnya akan kembali pada motif dasar investasi, yaitu ekspektasi terhadap *benefit* finansial.

Dalam konteks ini, skema bagi hasil atau tingkat keuntungan tetap menjadi daya tarik utama yang dicari oleh investor, yang tidak bisa digantikan sekadar oleh nilai-nilai normatif instrumen tersebut. Analisis ini juga menemukan adanya potensi segmentasi pasar atau *Niche Market*. Narasumber 2 (HI) memberikan nuansa berbeda dengan menyoroti bahwa identitas "Sukuk" yang melekat erat dengan nilai-nilai Keislaman memiliki daya tarik tersendiri bagi segmen investor spesifik. Beliau berpendapat bahwa label ini berpotensi membuka pintu bagi masuknya dana dari kawasan geopolitik tertentu, khususnya negara-negara Timur Tengah atau negara-negara di Afrika yang memiliki populasi mayoritas Muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun motif profit dominan, kesamaan identitas keagamaan dapat menjadi pintu masuk bagi arus modal dari wilayah-wilayah tersebut.

Namun, di balik potensi tersebut, muncul pula Skeptisisme Fundamental terkait klaim arus modal asing ini. Narasumber 2 (HI) melontarkan kritik mendasar yang bersifat struktural terkait definisi "investasi asing" dalam praktik di lapangan. Beliau mempertanyakan relevansi pembahasan modal asing jika ekosistem penerbitannya masih sangat domestik. Beliau



memberikan ilustrasi kritis: apabila lembaga penerbitnya adalah entitas lokal seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), peminjam dananya adalah warga negara Indonesia, dan perputaran investasinya dilakukan sepenuhnya di wilayah Indonesia, maka secara substansi "sebenarnya tidak ada investasi asing di sini". Kritik ini menantang asumsi dasar penelitian, apakah Green Sukuk (terutama seri ritel) benar-benar berfungsi sebagai penarik valuta asing atau hanya sekadar memutar likuiditas domestik.

Persepsi tentang Peluang (Opportunities)

Mengidentifikasi dan memetakan berbagai peluang positif yang diproyeksikan oleh para akademisi terkait penerbitan Green Sukuk. Analisis menunjukkan bahwa di balik tantangan yang ada, instrumen ini dipandang memiliki potensi strategis untuk mengangkat posisi Indonesia, baik dari sisi reputasi, stabilitas ekonomi, maupun keberlanjutan lingkungan. Peluang pertama yang paling menonjol adalah potensi Meningkatkan Kepercayaan dan Citra Positif Indonesia di mata dunia.

Narasumber 2 dari perspektif Hubungan Internasional (HI) meyakini bahwa keberadaan Green Sukuk "tentu saja berpengaruh" secara positif terhadap tingkat kepercayaan investor global. Namun, beliau memberikan catatan penting mengenai pemanfaatan dananya. Instrumen ini akan menjadi sangat menarik dan efektif membangun kepercayaan jika dana pinjaman tersebut "diolah lagi" ke dalam sektor-sektor produktif, bukan menjadi "dana terpendam" yang habis untuk kebutuhan konsumtif semata, seperti pembelian mobil atau rumah dinas. Jika syarat produktivitas ini terpenuhi, beliau menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dunia global terhadap komitmen dan stabilitas ekonomi Indonesia "akan membaik". Pandangan ini selaras dengan Narasumber 3 (AdBis), yang juga menyetujui bahwa Green Sukuk memiliki potensi besar untuk mendongkrak kepercayaan pasar. Akan tetapi, beliau memberikan syarat yang tegas dan tidak bisa ditawar: peluang ini hanya akan terwujud "jika" pemerintah "benar-benar profesional dalam mengelola itu".

Tanpa manajemen yang transparan dan profesional, peluang peningkatan citra ini bisa saja hilang. Peluang kedua berkaitan dengan fungsi ekonomi makro, yaitu Menarik Arus Modal Masuk (Diversifikasi). Narasumber 3 (AdBis) menilai penerbitan Green Sukuk sebagai sebuah "strategi bagus" yang cerdas dari pemerintah untuk "menambah peluang untuk investasi" dari pihak asing. Beliau menganalisis bahwa dengan adanya instrumen ini, arus kas masuk (*cash flow*) ke dalam negeri "akan bertambah". Implikasi positif dari masuknya valuta asing ini sangat signifikan, karena berpotensi memperkuat cadangan devisa dan pada akhirnya membuat nilai tukar mata uang Indonesia (Rupiah) menguat terhadap mata uang asing. Senada dengan optimisme tersebut, Narasumber 2 (HI) juga mengantisipasi akan adanya "dana masuk" yang nyata melalui skema ini, yang dapat menjadi darah segar bagi perekonomian nasional. Peluang ketiga menyentuh aspek fundamental dari tujuan instrumen ini, yaitu Pembangunan Berkelanjutan dan Sinergi Nilai.

Narasumber 3 (AdBis) menaruh harapan besar bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh Green Sukuk tidak hanya berhenti pada angka-angka finansial, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi rakyat. Beliau berharap manfaatnya dapat dirasakan oleh "seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia". Hal ini dikarenakan keberhasilan proyek energi hijau akan berkontribusi pada upaya global untuk mengeliminasi polusi, sebuah dampak



yang melintasi batas negara. Sementara itu, Narasumber 2 (HI) melihat adanya sinergi nilai yang kuat antara instrumen keuangan ini dengan nilai-nilai religius. Beliau menekankan bahwa dalam ajaran Islam, umat "diwajibkan untuk menjaga lingkungan". Oleh karena itu, investasi melalui Green Sukuk menjadi sarana yang tepat untuk memanifestasikan kewajiban tersebut, di mana kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dapat "mengeliminasi atau berkurangkan" melalui dukungan pendanaan yang etis dan bertanggung jawab.

Persepsi tentang Tantangan (Challenges/Hambatan)

Tidak dapat dipungkiri Berbagai risiko, hambatan, serta tantangan multidimensi yang diidentifikasi oleh para akademisi terkait implementasi Green Sukuk di Indonesia. Meskipun peluang yang ditawarkan cukup menjanjikan, para narasumber menekankan bahwa realisasi instrumen ini di lapangan menghadapi tembok tebal berupa kendala struktural, manajerial, hingga faktor eksternal yang tidak terduga. Tantangan Skala Prioritas (Urgensi) Tantangan pertama yang bersifat fundamental berkaitan dengan penentuan prioritas pembangunan nasional.

Narasumber 3 dari perspektif Administrasi Bisnis (AdBis) menyoroti tantangan krusial terkait kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai masih "tidak stabil". Beliau berargumen bahwa transisi menuju *Green Energy* merupakan sebuah proyek "jangka panjang" yang memakan waktu puluhan tahun, sehingga dalam kacamata pragmatis saat ini, proyek tersebut "belum terlalu urgent". Hal ini dikontraskan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang jauh lebih mendesak dan membutuhkan penanganan segera, seperti perbaikan infrastruktur dasar, masalah sosial, dan sektor pendidikan. Risiko terbesar dari situasi ini adalah potensi terjadinya disorientasi kebijakan, di mana pemerintah dikhawatirkan akan "ternomor duakan urusan yang urgent" demi mengejar ambisi dan fokus pada proyek *Green Energy*, yang pada akhirnya dapat mengabaikan kesejahteraan jangka pendek masyarakat.

Tantangan Profesionalisme, Transparansi, dan Korupsi Aspek tata kelola pemerintahan (*governance*) menjadi tantangan yang paling disorot dan dikritisi oleh para akademisi. Narasumber 3 (AdBis) memberikan peringatan keras bahwa investor, khususnya investor asing, mengharapkan standar transparansi penuh. Hal ini mencakup kejelasan terkait penggunaan dana, laporan progres yang akurat, hingga kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Risiko terbesar yang mengintai adalah hilangnya kepercayaan investor asing secara permanen apabila proyek-proyek yang didanai berakhir "mangkrak" atau pemerintah terbukti tidak kompeten dalam mengelola dana yang bernilai triliunan rupiah tersebut. Senada dengan kekhawatiran tersebut, Narasumber 1 (HI) juga menekankan aspek integritas moral. Beliau menaruh harapan besar sekaligus kecemasan agar kebijakan inovatif ini "tidak justru dari bancakan korupsi" oleh oknum-oknum tertentu, yang akan mencederai tujuan mulia dari instrumen keuangan syariah ini.

Tantangan Implementasi (SDM, Pemahaman, Akses) Pada level operasional, tantangan terbagi menjadi aspek teknis dan aspek sosial. Dari sisi teknis, Narasumber 3 (AdBis) menyebutkan bahwa proyek *Green Energy* bukanlah proyek sederhana, melainkan membutuhkan inovasi canggih serta investasi yang kuat di bidang teknologi riset. Hal ini menuntut ketersediaan *manpower* atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar profesional dan ahli di bidangnya, yang saat ini ketersediaannya mungkin masih terbatas. Di



sisi lain, Narasumber 1 (HI) lebih skeptis pada level sosial atau *grassroots*. Beliau mempertanyakan seberapa dalam pemahaman masyarakat mengenai konsep keberlanjutan dan apakah "orientasi ekonomi masyarakat" saat ini sudah sejalan dengan visi proyek hijau. Jika orientasi masyarakat masih pragmatis jangka pendek, maka risiko kegagalan proyek akan meningkat, yang berujung pada risiko pinjaman tidak kembali atau kredit macet.

Tantangan Struktural (Komoditas) Indonesia menghadapi dilema ekonomi yang mendalam, yang diidentifikasi oleh Narasumber 3 (AdBis) sebagai tantangan struktural. Perekonomian Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada sektor komoditas, khususnya batu bara, yang ironisnya merupakan penyumbang ekonomi terbesar sekaligus sumber polusi utama. Terdapat kontradiksi antara tujuan ekonomi hijau dengan realitas penopang ekonomi nasional. Narasumber 3 menyadari bahwa proses transisi untuk mengeliminasi ketergantungan pada batu bara demi beralih ke *green energy* "butuh proses yang cukup lama" dan merupakan langkah yang sangat sulit untuk dieksekusi tanpa mengguncang stabilitas ekonomi yang sudah ada. Tantangan Eksternal (*Force Majeure*)

Terakhir, analisis ini mencatat adanya risiko yang berada di luar kendali manusia atau mitigasi kebijakan. Narasumber 2 (HI) secara spesifik mengkhawatirkan risiko yang bersifat *force majeure*. Paradoksnya, beliau justru khawatir pada risiko lingkungan itu sendiri yang menjadi objek pembiayaan. Bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, atau kabut asap dapat menghancurkan proyek yang sedang berjalan. Kerusakan fisik akibat bencana ini dapat membuat pihak pengelola atau investor "tidak mampu, atau kurang punya kemampuan untuk mengembalikan" pinjaman, sehingga menciptakan risiko gagal bayar yang murni disebabkan oleh faktor alam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa para akademisi memandang Green Sukuk sebagai inovasi yang relevan bagi pembangunan hijau sekaligus berpotensi menarik modal asing, meskipun efektivitasnya tetap sangat dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti keuntungan investasi dan stabilitas politik. Instrumen ini dinilai mampu mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan prinsip syariah dalam mekanisme ekonomi modern, meskipun sebagian narasumber menilai penggunaan label "green" dan "syariah" masih perlu pendalaman agar tidak hanya bersifat simbolis. Green Sukuk dianggap memiliki peluang besar untuk memperkuat reputasi Indonesia, meningkatkan arus modal, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, asalkan dikelola secara profesional, transparan, dan diarahkan pada sektor produktif. Namun, tantangan seperti tata kelola yang lemah, ketidakpastian prioritas pembangunan, keterbatasan SDM, serta risiko bencana alam masih perlu diatasi. Keberhasilan instrumen ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan integritas pemerintah dalam menjaga penerapan nilai hijau dan syariah secara nyata, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk menilai dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi hijau dan persepsi investor internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adzimatunur, F., Oliy, & Japal, D. F. T. (2024). The Evolution of Green Sukuk in Indonesia. *International Journal of Sustainable Finance*.



- Baita, A., & Suleiman, H. (2021). The role of academic perspectives in evaluating Islamic finance instruments. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 6(3), 45-59.
- Bank Indonesia. (2025). Laporan Arus Modal Asing keluar pada November 2025. Jakarta. Bank Indonesia.
- BNPB. (2023). Data Informasi Bencana Indonesia. Jakarta. *BNPB*.
- Fahlevi, M. F. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Perkembangan Green Sukuk di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 9(10). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.16847>
- Fitria Widiyani Roosinda, N. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Kementerian Pertanian (Kementan). (2020). Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan. Jakarta. *Kementan*.
- Kurnia, F., & Suwita, L. (2024). Analisis Peran Dan Kontribusi Green Sukuk Terhadap Implementasi Sustainable Development Goals (SDG'S) di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 10(2), 118-125. <https://doi.org/10.31869/me.v10i2.5319>
- LIPI. (2020). Kajian Dampak Perubahan Iklim Ekosistem Laut Indonesia. Jakarta. *LIPI*.
- Maharani, S. (2018). Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Masalah Siswa pada Materi Lingkaran. *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif*, 1 (5), 819-826. <https://doi.org/10.22460/jpmi.v1i5.p819-826>
- Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi pengembangan green sukuk dan aspek hukum di indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 221-234. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>
- N Qur'an. (2025). Green Sukuk: Instrumen pembiayaan sektor hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan tahun 2018 - 2023. *Bisnis Net: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 464-476. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.5695>
- Pujiantoro, A. S. G. (2021). Peluang dan tantangan green sukuk di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(4), 213-223. <https://doi.org/10.14710/djieb.20242>
- Sisdianto, E. (2024). The Role of Green Sukuk in Post-Pandemic Economic Recovery in Indonesia. *KnE Social Sciences*.
- World Bank Treasury. (2022). *Sovereign green, social and sustainability bonds: Unlocking the potential for emerging markets and developing economies*.